

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang mendasar bagi setiap manusia, sampai saat ini diketahui bahwa sekitar 400 juta orang masih belum memiliki akses ke layanan kesehatan *esensial* dan 40% penduduk di dunia tidak memiliki perlindungan sosial, dan *Universal Health Coverage* (UHC) termasuk salah satu akses untuk dapat mencapai hak kesehatan tersebut (WHO, 2021)

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengimplementasikan *Universal Health Coverage* (UHC). Negara Indonesia ditargetkan pemerintah dapat menggapai UHC atau cakupan kesehatan semesta kepada semua penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyebutkan bahwa terbentuknya jaminan sosial yang mewajibkan bagi semua penduduk Indonesia yakni Jaminan Kesehatan Nasional. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh pemerintah yang merupakan jaminan berwujud perlindungan kesehatan yang dimaksud agar peserta dapat memperoleh dari manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diperuntukkan kepada setiap orang yang sudah membayar iuran maupun iurannya dibayar oleh pemerintah.

Kepesertaan adalah salah satu aspek dari beberapa dimensi yang dicapai dari *Universal health Coverage* (UHC) yang dijelaskan oleh *World Health Organization* (WHO) menjadi barometer keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial aspek kepesertaan diatur juga dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 pasal 6 mengatakan bahwa semua penduduk Indonesia diwajibkan untuk mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan (Presiden RI, 2018)

Berdasarkan data Dewan Jaminan Sosial Nasional, sampai dengan September 2022 jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Indonesia yang telah terdaftar dalam program JKN adalah berjumlah 244.600.449 peserta atau (90.2%), yang terdiri atas peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 148.490.012 peserta atau (60.7%). Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) berjumlah 96.110.437 peserta atau (39.3%) yang terdiri atas peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) berjumlah 61.299.858 peserta atau (25.0%), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) berjumlah 30.624.423 peserta atau (12.5%), dan peserta Bukan Pekerja (BP) berjumlah 4.256.156 peserta atau (1,7%). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 271.066.365 jiwa maka, masih terdapat 26.465.907 jiwa atau (9.8%) yang masih belum terdaftar sebagai peserta JKN (DJSN, 2022).

Sedangkan pada Profil Kepesertaan Jawa Timur sampai dengan September 2022 menunjukkan bahwa peserta JKN di Provinsi Jawa Timur berjumlah 32.897.112 peserta atau (82.5%) yang terdiri atas peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 21.924.165 peserta atau (66.6%). Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) berjumlah 10.972.947 peserta atau (33.4%) yang terdiri atas peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) berjumlah 6.442.559 peserta atau (19.6%), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

berjumlah 3.867.824 peserta atau (11.8%), dan peserta Bukan Pekerja berjumlah 662.564 peserta atau (2.0%). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Timur 39.886.288 jiwa maka, masih terdapat 6.989.176 jiwa atau (17.5%) yang masih belum terdaftar sebagai peserta JKN (DJSN, 2022).

Sedangkan pada profil kepesertaan Kabupaten Malang per September 2022, menunjukkan peserta JKN berjumlah 1.785.684 peserta atau (68.2%) yang terdiri atas peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 1.156.009 peserta atau (64.7%). Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) berjumlah 629.675 peserta atau (35.3%) yang terdiri atas peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) berjumlah 326.452 peserta atau (18.3%), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) berjumlah 268.931 peserta atau (15.1%), dan peserta Bukan Pekerja berjumlah 34.292 peserta atau (1.9 %). Apabila dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Malang 2.619.975 jiwa maka masih terdapat 834.291 jiwa atau (31.8%) yang masih belum terdaftar sebagai peserta JKN (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2022). Target kepesertaan JKN kembali ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 mengamanatkan bahwa BPJS Kesehatan mendorong kepesertaan JKN pada tahun 2024 ditargetkan 98% dari penduduk Indonesia, dengan melihat data kepesertaan tersebut dapat dikatakan Negara Indonesia masih belum mencapai target UHC.

Dengan seiring bertambahnya penduduk di Indonesia, harus pula diikuti dengan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam program JKN-KIS. Yang dimaksud partisipasi tersebut yaitu dengan ikut sertanya seluruh anggota masyarakat guna memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam bidang kesehatan partisipasi yang dimaksud adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan kesehatan mereka sendiri (Notoatmodjo, 2007). Dengan

ikutsertanya masyarakat dalam program JKN-KIS dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan sehingga dapat memecahkan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait kepesertaan tentu ada hubungan antara pengetahuan dan dukungan sosial dengan keikutsertaan masyarakat dalam Program JKN. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumatra Laila, dkk (2020) menunjukkan hasil terdapat hubungan antara pengetahuan mengenai JKN dengan keputusan pekerja mandiri atau PBPU menjadi peserta JKN. Hal tersebut di karenakan pengetahuan yang baik akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak, mengambil keputusan dan bersikap baik juga. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian Darmayanti & Raharjo (2020) yang menyatakan bahwa responden yang dengan tingkat pengetahuan yang tinggi akan berpeluang 1,562 kali lebih besar menjadi peserta JKN mandiri bila dibandingkan dengan responden dengan tingkat pengetahuan rendah.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti & Raharjo (2020) hasil penelitian menunjukkan ada hubungan dukungan sosial dengan keikutsertaan masyarakat dalam program JKN, peneliti berpendapat bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan terhadap responden maka semakin tinggi kemauan menjadi peserta JKN. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Azinar (2018), menyatakan bahwa masyarakat yang mendapatkan dukungan sosial seperti dukungan dari keluarga akan memiliki peluang dua kali lebih besar untuk dapat berpartisipasi menjadi peserta JKN jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mendapat dukungan sosial dari keluarganya terkait dengan kepesertaan JKN.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui diketahui bahwa masyarakat mengetahui terkait JKN, namun informasi yang didapatkan masih terbatas dikarenakan kurangnya

sosialisasi sehingga pengetahuan mereka minim. Selain itu juga mereka berfikir bahwa dengan mendaftar sebagai peserta JKN namun tidak memanfaatkannya mereka merasa rugi karena setiap bulannya harus membayar iuran. Serta masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti program JKN karena keluarga mereka tidak mengikuti program JKN sehingga tidak ada ajakan dan dorongan untuk menjadi peserta JKN, serta banyaknya tokoh masyarakat yang tidak ikut mejadi peserta JKN sehingga dukungan sosial masyarakat terhadap JKN rendah.

Berdasarkan uraian masalah diatas yang menjelaskan bahwa hubungan pengetahuan dan dukungan sosial memiliki peran yang cukup besar terhadap keikutsertaan dalam program JKN. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Sosial Dengan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Sosial Dengan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan dukungan sosial dengan keikutsertaan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program JKN di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi.
2. Untuk mengetahui tingkat dukungan sosial masyarakat mengenai program JKN di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi.
3. Untuk menganalisis hubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam program JKN di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi.
4. Untuk menganalisis hubungan dukungan sosial dengan keikutsertaan masyarakat dalam program JKN di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber informasi dan masukan bagi BPJS Kesehatan mengenai penelitian hubungan pengetahuan dan dukungan sosial terhadap keikutsertaan masyarakat dalam program JKN di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi sehingga diharapkan menjadi salah satu referensi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan program JKN dalam mencapai target UHC.

2. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan wawasan dan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan yang ada di lapangan